

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Imigran gelap adalah sebuah masalah yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagi Indonesia, baik secara financial maupun material. Imigran gelap dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari negara asal, seperti perang atau konsekuensi ekonomi, yang kemudian mendorong para imigran untuk pergi dari daerah asal dan mencari penghidupan baru di daerah lain. Sedangkan faktor eksternal adalah berasal dari negara tujuan, karena adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karena negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Khusus untuk Indonesia, perlakuan yang diberikan pemerintah, yang terkesan tidak tegas, menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum imigran untuk menjadikan Indonesia bukan lagi sebagai negara transit, melainkan juga sebagai negara tujuan akhir mereka.

Untuk menanggulangi dan mencegah kasus imigran gelap, Indonesia menjalin kerjasama dengan dunia internasional, baik secara bilateral maupun multilateral serta dengan badan internasional PBB yang mengurus masalah pengungsi dan imigran gelap, seperti UNHCR dan IOM. Kerjasama bilateral lebih intensif dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembangunan rumah detensi, pelatihan dan pendidikan aparat negara dalam penanggulangan imigran gelap

serta bantuan peralatan dan infrastruktur penunjang dalam mengatasi masalah imigran gelap. Namun kerjasama yang dijalin dengan Pemerintah Australia lebih menguntungkan secara sepihak bagi Australia, sebab Indonesia diminta untuk melakukan penangkapan terhadap imigran gelap tetapi tidak dapat meneruskan ke negara Australia, sehingga memaksa Indonesia harus menanggung beban sendiri dalam mengurus kaum imigran gelap tersebut selama tinggal di Indonesia dan berbagai dampak sosial yang mungkin timbul yang dapat merugikan masyarakat Indonesia dalam segenap aspek kehidupan. Selain itu, kerjasama dengan IOM dan UNHCR juga tidak maksimal disebabkan kedua lembaga internasional PBB seringkali tidak mampu memberikan solusi yang tepat dan tidak dapat memberikan bantuan dana untuk mengurus para imigran gelap tersebut.

Lemahnya penegakan hukum keimigrasian dan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang imigran gelap dan penyelundupan manusia menjadi celah tersendiri bagi para imigran gelap dan agen penyelundup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. Disamping itu, perlakuan Pemerintah Indonesia yang cukup istimewa terhadap mereka dengan menerima mereka seperti tamu resmi bukan sebagai pelaku kriminal juga mendorong para imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia. Permasalahan lain yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya tingkat kedisiplinan dan mentalitas aparaturnegara dalam menegakkan hukum keimigrasian menjadi lubang besar bagi imigran gelap masuk wilayah Indonesia dengan bebas dan cukup aman.